

**TABULASI PERUMUSAN HASIL SIDANG KOMISI RAKOR PUSAT DAN DAERAH BIDANG KEBUDAYAAN 2016**

- Komisi V : Penguatan Ekosistem Warisan dan Diplomasi Budaya  
 Pengarah : Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya  
 Fasilitator : 1. Mula Sinaga  
 2. Sainih  
 Tim Perumus : 1. Hapri Ika Poigi (Dewan Kesenian Sulawesi Tengah)  
 2. Anastasia P (Disdikbud Kutai Timur)  
 3. Dr. Ismet R ( Komunitas Sambasunda)  
 4. Muh. Nur Saleh ( Disbudpar Sulawesi Selatan)  
 5. Rim (Disdikbud Prov. Sulawesi Tengah)  
 6. Hadran Effendi (Disbudpar Sumatera Selatan)

	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Gagasan Solutif</b>	<b>Rencana Prioritas</b>	<b>Kesepakatan-kesepakatan</b>
<b>Pendataan</b>	1. Keberlanjutan program dan kegiatan  2. Pelibatan Publik belum terwadahi secara baik dari pusat sampai	1. Sudah ada lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah yang melakukan inisiatif pendataan warisan budaya yang bersifat benda dan takbenda.  2. Adanya kebijakan-kebijakan dalam pelibatan publik baik secara institusional	1. Perlu adanya program kerja sama pendataan yang multi pihak antara pusat, daerah dan komunitas.  2. Perlu Koordinasi pusat dan daerah secara spesifik dalam pencarian data pokok	1. Perlu adanya Regulasi yang mendukung kerja sama antara Pemerintah Pusat, Daerah dan Komunitas.  2. Perlu adanya Perjanjian kerjasama terhadap institusi yang mengelola sistem data dan pelibatan

	<p>daerah.</p> <p>3. Belum ada Pedoman atau juknis yang spesifik pada setiap daerah</p> <p>4. Pendanaan Terbatas</p>	<p>maupun personal.</p> <p>3. Melakukan pendataan dengan standardisasi nasional dan juga diutamakan kekhasan daerah masing-masing</p> <p>4. Mengakses sumber dana dan sumber daya eksternal (BUMN, BUMD dan perseorangan)</p>	<p>3. Perlu membentuk kelompok kerja yang terdiri dari multi pihak untuk menyusun pedoman standar yang bisa diterapkan secara nasional.</p> <p>4. Menyesuaikan kegiatan pendataan sesuai dana yang ada</p>	<p>masyarakat secara partisipatif</p> <p>3. Kebijakan secara internal terhadap metodologi dalam pengumpulan data berdasarkan karakteristik daerah</p> <p>4. Alokasi Dekonsentrasi anggaran dan lintas Kementerian/Lembaga untuk kegiatan pendataan di setiap daerah.</p> <p>Catatan: Daerah yang sudah memiliki APBD setiap tahun ditingkatkan terus menerus.</p>
<p><b>Kompetensi &amp; Sertifikasi Bidang Kebudayaan</b></p>	<p>1. Belum meratanya tingkatan kompetensi di masing-masing daerah</p> <p>2. Standarisasi bagi para ahli yang kompetitif dan</p>	<p>1. Aktivitas dan aktivis budaya sebagian besar belum terkoneksi secara maksimal.</p> <p>2. Optimalisasi seluruh pemangku kepentingan kebudayaan ( diusulkan</p>	<p>1. Perlu adanya multi pihak dalam peningkatan kompetensi yang bersertifikasi</p> <p>2. Mendorong sinergitas antara pusat dan daerah</p>	<p>1. Perlu membuat lembaga sertifikasi multi disiplin dan berbasis budaya.</p> <p>2. Perlu kesepahaman pusat dan daerah tentang standar kompetensi</p>

	<p>berjenjang belum optimal</p> <p>3. Kurangnya tenaga ahli riset yang menguasai metodologi secara spesifik terhadap warisan budaya benda dan tak benda.</p> <p>4. Belum adanya kebijakan tentang Diklat kompetensi dan sertifikasi baik secara formal dan non formal.</p>	<p>Revitalisasi Pamong budaya menuju peningkatan keahlian)</p> <p>3. Mengadakan festival budaya dengan mengandalkan SDM yang berdaya saing.</p> <p>4. Dibeberapa daerah telah dilakukan kegiatan Diklat yang non reguler.</p>	<p>secara nasional.</p> <p>3. perlu kesepahaman dalam meningkatkan kompetensi pusat, daerah dan komunitas dalam setiap event dalam diplomasi budaya</p> <p>4. adanya peningkatan kompetensi dengan pendidikan dan pelatihan bidang Kebudayaan</p>	
<b>Mobilisasi Sumberdaya</b>	<p>1. Sektor kebudayaan belum menjadi prioritas pembangunan di daerah</p> <p>2. Alokasi anggaran belum memadai untuk mendukung sarana dan</p>	<p>1. Melakukan promosi budaya daerah di tingkat nasional dan internasional</p> <p>2. Melakukan pendokumentasian, investarisasi dan registrasi warisan</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dengan pusat, daerah, stakeholder dan pemangku kepentingan</p> <p>2. Memfasilitasi berbagai kegiatan kebudayaan baik skala regional, nasional dan</p>	<p>1. Meningkatkan alokasi pendanaan/anggaran bidang kebudayaan (APBN, APBD dan sektor swasta)</p> <p>2. Meningkatkan partisipasi peran swasta dalam pelestarian kebudayaan</p>

	<p>prasarana</p> <p>3. Masih rendahnya keterlibatan swasta dalam pembangunan sarpras kebudayaan</p>	<p>budaya tangible dan intangible</p> <p>3. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan</p>	<p>internasional</p> <p>3. Mendorong peningkatan keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan kebudayaan</p>	<p>3. Meningkatkan promosi budaya di tingkat regional, nasional dan internasional</p> <p>4. Melakukan inventarisasi, registrasi terhadap warisan budaya (benda dan tak benda) yang akan diusulkan</p>
<p><b>Pemantapan Tata Kelola</b></p>	<p>1. Belum adanya keseragaman nomenklatur bidang kebudayaan di tiap-tiap provinsi, kab/kota</p> <p>2. Belum maksimalnya sinergi antara lembaga pemerintah (kab/kota, Provinsi dan</p>	<p>1. Mengusulkan nomenklatur bidang kebudayaan ke pemerintah daerah</p> <p>2. Melibatkan stakeholder dalam pengumpulan data untuk pengusulan penetapan warisan budaya (benda dan tak benda)</p>	<p>1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam merumuskan nomenklatur yang sesuai dengan bidang kebudayaan di tingkat provinsi dan kab/kota</p> <p>2. Mengintensifkan pementasan-pementasan seni budaya di skala regional, nasional dan internasional secara berkesinambungan</p>	<p>1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan nomenklatur yang sesuai bidang kebudayaan</p> <p>2. Menginsentifkan pementasan-pementasan seni budaya di tingkat regional, nasional dan internasional</p>

	<p>Pusat) dan non Pemerintah</p> <p>3. Masih kurangnya sosialisasi kriteria usulan penetapan mengenai cagar budaya dan warisan budaya (benda dan tak benda)</p>	<p>3. Mempromosikan warisan budaya (benda dan tak benda) yang telah ditetapkan dalam skala regional, nasional, internasional sebagai upaya pelestarian</p>	<p>3. Lebih memaksimalkan lagi sosialisasi ke setiap daerah tentang warisan budaya (benda dan tak benda)</p>	<p>3. Memaksimalkan sosialisasi di tingkat provinsi dan kab/kota</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------